

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
*OWNERSHIP STRUCTURE* TERHADAP *DISCLOSURE*  
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BEI TAHUN 2012-2013**

**Hendy Tejapranata**

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
hendytejapranata@gmail.com

**Dr. Yie ke Feliana, S.E., M.Com., CPA., Ak., CFP., CA.**

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
yfeliana@yahoo.com

**Abstrak**

Konsep tata kelola didasari dengan adanya teori agensi dimana di dalam perusahaan dibutuhkan suatu mekanisme tata kelola yang baik yang digunakan untuk memastikan pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pemegang saham. Dalam hal ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *good corporate governance* dan *ownership structure* terhadap *disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap 500 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2013. *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan *independent director*. Sedangkan Struktur Kepemilikan diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Pengaruh tata kelola dan struktur kepemilikan diuji terhadap pengungkapan baik wajib maupun sukarela menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini melibatkan ukuran perusahaan, likuiditas perusahaan, dan tipe auditor.

Hasil yang ditunjukkan penelitian ini adalah (1) aktivitas tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan baik wajib maupun sukarela; (2) struktur kepemilikan yang diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan baik wajib maupun sukarela; (3) terdapat hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan serta tidak ada hubungan antara likuiditas dan tipe auditor terhadap pengungkapan baik wajib maupun sukarela.

**Kata Kunci : Tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan , pengungkapan**

**ABSTRACT**

*The concept of governance based on the existence of agency theory in which the company needed a good governance mechanism that is used to ensure corporate governance complies with applicable regulations so as to provide confidence to*

*shareholders. In this case, there are some previous studies showed mixed results. The study aims to determine the impact of good corporate governance and ownership structure of the disclosure in the company's annual report on companies listed in the Indonesia Stock Exchange.*

*This study tested the 500 companies listed on the Stock Exchange 2012-2013 period. Good Corporate Governance is measured by using independent director. While the ownership structure is measured using managerial ownership and concentrated ownership. Effect of governance and ownership structure was tested against both mandatory and voluntary disclosure using multiple regression analysis. The study involved the size of the company, the liquidity of the company, and the type of auditor.*

*Results of this study are shown (1) The activity of corporate governance had no effect on either mandatory or voluntary disclosure; (2) The ownership structure is measured using managerial ownership and concentrated ownership also has no effect on either mandatory or voluntary disclosure; (3) there is a significant relationship between the size of the company with the disclosure and no relationship between liquidity and the type of auditor for both mandatory and voluntary disclosure.*

***Keywords: corporate governance, ownership structure, disclosure***

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, Perusahaan terbuka atau emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang diatur dalam peraturan nomor X.K.6 Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-431/BL/2012. Dalam peraturan X.K.6 dinyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit, serta surat pernyataan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Terdapat kasus skandal penipuan akuntansi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terkemuka salah satunya adalah *Enron*, *WorldCom*, dan *Parmalat* yang berasal dari kurang baiknya sistem tata kelola perusahaan (Muhamad *et al.*, 2009). Sejak tahun 2000, Enron merupakan perusahaan dengan pertumbuhan finansial yang pesat dan menjadikannya salah satu diantara 10 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Skandal mulai terungkap pada tahun 2002, dimana total pendapatan Enron di tahun 2000 berjumlah 100,8 miliar USD, kemudian dihitung kembali oleh *Protelum Finance Company* (PFC) menjadi 9 miliar USD. Ketika

Enron mulai mengalami kebangkrutan, harga sahamnya juga turun dari sekitar 80 USD menjadi kurang dari 1 dolar. Skandal ini disebabkan karena adanya *misleading financial statement* yang membawa dampak yang besar yaitu Enron mengalami kebangkrutan, kurangnya informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika Serikat, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron serta hilangnya pekerjaan atas ribuan karyawan Enron (Arifin, 2005).

Di Indonesia terdapat beberapa contoh akibat kurangnya sistem tata kelola yang baik seperti *insider trading* saham PT Bank Central Asia, Tbk. Pada tahun 2001 terdapat dugaan *insider trading* atas saham PT Bank Central Asia. *Insider trading* merupakan salah satu perilaku buruk yang dilakukan oleh orang dalam BCA dalam proses transaksi saham. Menanggapi adanya rumor yang beredar di masyarakat, Bapepam membentuk tim pemeriksa khusus untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan kerja sama dengan pihak PT Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan analisis pola transaksi dan pola order laporan yang disampaikan oleh PT Bursa Efek Jakarta, terdapat indikasi terjadinya manipulasi pasar yang mengarah kepada pembentukan harga saham BBCA pada harga tertentu, seperti periode kenaikan harga saham BBCA setelah *stock split* (15 Mei s/d 12 Juni 2001) menunjukkan adanya dominasi beli dari beberapa anggota bursa yang diperkirakan memicu kenaikan harga saham tersebut dan periode penurunan harga saham BBCA (13 Juni s/d 29 Juni 2001) serta terdapat periode penurunan harga saham BBCA (13 Juni s/d 29 Juni 2001) yang menunjukkan adanya dominasi jual dari beberapa anggota bursa yang sama dengan pada periode kenaikan, yang diperkirakan memicu penurunan harga saham. Hal tersebut berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi tersebut (Bapepam, 2001).

Dampak utama akibat munculnya skandal penipuan akuntansi adalah keraguan masyarakat atau pemangku kepentingan pada perusahaan dan institusi pendukungnya. Akibatnya, banyak kalangan termasuk investor, pemegang saham, dan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan keterbukaan agar laporan yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan. Menurut Boesso dan Kumar (2006) tuntutan adanya

transparansi ini dikarenakan adanya ketidakpuasan dengan pengungkapan yang diwajibkan oleh Bapepam. Akibat dari tuntutan atas ketidakpuasan ini, investor dan *stakeholder* meminta perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela mengenai strategi dan kinerja perusahaan.

Oleh sebab itu, banyak peneliti mencoba untuk mempelajari apakah tata kelola perusahaan memiliki dampak terhadap pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adelopo (2011) menunjukkan hubungan negatif antara *ownership structure* dengan *voluntary disclosure*. Dalam penelitian ini, Adelopo mencoba untuk menguji apakah terdapat hubungan positif antara *managerial share ownership* dan *block share ownership* terhadap *voluntary disclosure*. Hasilnya terdapat hubungan negatif antara *managerial share ownership* dan *block share ownership* terhadap *voluntary disclosure*. Namun, terdapat hasil yang berbeda seperti dikemukakan oleh Eng dan Mak (2003). Dalam penelitian ini, Eng dan Mak mencoba untuk menguji apakah terdapat hubungan negatif antara *managerial ownership* dan *blockholder ownership disclosure* terhadap *voluntary disclosure*. Hasilnya terdapat hubungan negatif antara *managerial ownership* terhadap *voluntary disclosure* serta *blockholder ownership* tidak memiliki hubungan terhadap *disclosure*.

Selain itu, terdapat penelitian lain seperti dikemukakan oleh Huafang dan Jianguo (2007). Pada penelitian ini menguji apakah terdapat hubungan positif antara *managerial ownership*, *blockholder ownership*, dan *independent director* terhadap *voluntary disclosure*. Hasilnya terdapat hubungan positif antara *blockholder ownership* terhadap *voluntary disclosure* serta terdapat hubungan positif *independent director* terhadap *voluntary disclosure*.

Selain itu, terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara *corporate governance* dengan *voluntary disclosure* (Arcay dan Vazquez, 2005). Pada penelitian ini menguji apakah terdapat hubungan positif antara *independent director*, *existence of an audit committee*, dan *CEO duality* terhadap *voluntary disclosure*. Hasilnya terdapat hubungan positif antara *independent director*, *existence of an audit committee* terhadap *voluntary disclosure*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak *corporate governance* dan *ownership structure* terhadap *disclosure* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengungkapan baik wajib maupun sukarela serta menganalisa dampak *corporate governance* dan *ownership structure* terhadap *disclosure* pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### ***Agency Theory***

Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Konsep ini didasari adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen di dalam suatu organisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dibuat oleh agen sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya, *principal* dapat menilai dan mengawasi kinerja dari agen untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa semua orang bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemilik diasumsikan hanya tertarik kepada investasi mereka yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan manajer diasumsikan hanya tertarik pada penerimaan kompensasi keuangan (Jensen dan Meckling 1976).

Di sisi lain, *principal* mengharapkan *return* yang tinggi atas dana yang mereka investasikan. Sedangkan agen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif pengelolaan dana pemilik perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan terpaksa menanggung *agency cost* dimana biaya tersebut timbul agar manajer bertindak sesuai dengan tujuan *principal* (Nuswandari, 2009). *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory* yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan mendapat *return* atas dana yang mereka investasikan.

### ***Corporate Governance***

Ada beberapa pengertian mengenai *Corporate Governance*. Menurut Merchant dan Stede (2014) *Corporate Governance* adalah seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya.

Menurut Tunggal (2014) asas-asas yang *good corporate governance* yang wajib diterapkan oleh badan usaha / perusahaan adalah:

1. *Transparency*

Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standarization, efficiency time & cost*). Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola.

2. *Accountability*

Penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholder*, dan *Auditor* (pertanggungjawaban wewenang, *traceable, reasonable*). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh Organ Perseroan.

3. *Reponsibility*

Pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Responsibilitas diperlukan agar menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. *Independency/Kemandirian* (bebas dari pengaruh pihak lain)

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Komisaris,

Direksi, dan Manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

#### 5. Keadilan (*Fairness*)

Perlindungan kepentingan *minority shareholder* dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*selfdealing* atau *insider trading*). Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.

#### 6. *Disclosure*

*Disclosure* adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Disclosure* erat kaitannya dengan transparansi, yaitu Perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja Perusahaan.

#### ***Independent Director***

*Independent Director* merupakan wakil dari pemegang saham/ *shareholder*. *Independent Director* bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku manajemen (Rosenstein dan Wyatt, 1990). *Independent director* digunakan untuk mengurangi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham (Gregory dan Simmelkjaer, 2002). Jika posisi dewan komisaris dikendalikan oleh pihak manajemen maka akan terjadi praktik kolusi dan dapat mengambil harta kekayaan dari pemegang saham. Oleh karena itu, masuknya orang luar/*outsiders* ke dalam dewan akan mengurangi praktik kolusi, sebab *independent director* akan disiplin dalam menilai kinerja (Fama, 1980).

Terdapat literatur yang memberikan bukti empiris yang mendukung peran *independent director* dalam memberikan kebijakan pengungkapan yang lebih baik. Chen dan Jaggi (2000) menemukan bukti empiris mengenai hubungan positif antara *Independent Director* memiliki hubungan positif dengan *voluntary disclosure*. Proporsi *independent director* juga memiliki hubungan negatif dengan pengukuran kualitas informasi buruk yang diungkapkan oleh perusahaan seperti publikasi penipuan atau

laporan keuangan yang dimanipulasi (Beasley, 1996). Hasil ini menunjukkan perusahaan yang memiliki proporsi *independent director* yang tinggi akan lebih berfokus untuk melakukan *disclosure*. Sehingga dari adanya hubungan antara variabel-variabel maka munculah hipotesis sebagai berikut:

H1a: Semakin besar komposisi *independent director* pada suatu perusahaan akan memiliki pengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*.

H1b: Semakin besar komposisi *independent director* pada suatu perusahaan akan memiliki pengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*.

### ***Ownership structure***

*Ownership Structure* didefinisikan sebagai jumlah pemegang saham yang dominan (*large-block shareholder*) ataupun jumlah dari saham yang dimiliki (Tunggal, 2014). *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976; Watts, 1977) menunjukkan bahwa dimana ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dari perusahaan, berpotensi meningkatkan *agency cost* karena adanya konflik kepentingan antara *contracting parties*. Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa konflik antara *principal* dan *agent* pada perusahaan terbuka lebih besar daripada perusahaan tertutup. Akibatnya, pengungkapan informasi lebih banyak pada perusahaan terbuka sehingga *principals* dapat secara efektif dalam melakukan pemantauan. Menurut Eng dan Mak (2003) *ownership structure* dapat diukur dengan *managerial ownership* dan *blockholder ownership*.

### ***Managerial Ownership***

*Managerial ownership* yaitu kepemilikan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris (Huafang dan Jianguo, 2007). Pendekatan keagenan menganggap struktur *managerial ownership* sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara berbagai klaim terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Namun, ketika *managerial ownership* rendah, akan muncul *agency problem* yaitu manajer akan memperbesar insentif untuk tunjangan dan mengurangi insentif yang

dapat meningkatkan *organizational performance*. Oleh karena itu, *outside shareholders* meningkatkan pemantauan terhadap perilaku manajer untuk mengurangi *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976; Eng dan Mak, 2003). Namun, pemantauan yang dilakukan oleh *outside shareholders* dapat dikurangi apabila manajer memberikan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Bukti empiris dilakukan oleh Ruland et al. (1990) yang menunjukkan bahwa *managerial ownership* memiliki hubungan negatif dengan *disclosure*.

Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Huafang dan Jianguo (2007) bahwa tingkat kepemilikan saham manajer dapat mengurangi *agency cost* karena bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan *shareholder*. *Agency Theory* memprediksi adanya hubungan positif antara kepentingan manajemen dengan *voluntary disclosure*. Warfield et al. (1995) memberikan bukti mengenai temuan *managerial ownership* memiliki hubungan positif dengan jumlah pengungkapan informasi mengenai *earning*. Sehingga dari adanya hubungan antara variabel-variabel maka munculah hipotesis sebagai berikut:

H2a: Proporsi *managerial ownership* pada suatu perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

H2b: Proporsi *managerial ownership* pada suatu perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap *voluntary disclosure*.

### ***Blockholder Ownership***

*Blockholder ownership* yaitu kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham substansial/ kepemilikan 5% atau lebih (Huafang dan Jianguo, 2007). Ketika struktur kepemilikan tersebar, maka kegiatan pemantauan lebih diperlukan. Bukti empiris yang dilakukan oleh McKinnon dan Dalimunthe (1993); Mitchell et al (1995); Schadewitz dan Blevins, (1998) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *blockholder ownership* dan *disclosure*. Oleh karena itu, diharapkan dengan meningkatnya pengungkapan sukarela dapat menurunkan kepemilikan terkonsentrasi/*blockholder ownership*

Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa *substantial shareholder* diharapkan memiliki kekuatan dan insentif yang lebih

besar untuk melakukan pemantauan terhadap manajemen. Jensen (1993) mengemukakan bahwa *diffusion in ownership* dapat menimbulkan *agency problem* antara *principal (shareholder)* dan *agent (management)*. *Agency problem* dapat diatasi dengan melibatkan *substantial shareholder* dalam kegiatan pemantauan (Shleifer dan Vishny, 1986; Huddart 1993; Noe, 2002). Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan lebih banyak informasi pada laporan tahunan untuk mengurangi *agency cost* termasuk kegiatan pemantauan. Sehingga dari adanya hubungan antara variabel-variabel maka munculah hipotesis sebagai berikut:

H3a: Proporsi *blockholder ownership* pada suatu perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

H3b: Proporsi *blockholder ownership* pada suatu perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap *voluntary disclosure*

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis *explanatory research* karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *good corporate governance* dan *ownership structure* terhadap *disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *positivism*, karena menggunakan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena (Efferin *et al.*, 2008). Sementara itu untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan *judgement sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan agar relevan dengan tujuan penelitian. Data berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan akan dieliminasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, telah memperoleh hasil untuk masing-masing permodelan regresi. Rangkuman hasil penelitian melalui uji hipotesis akan dibahas untuk masing-masing hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1a

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *independent director* dengan *mandatory disclosure*. Nilai variabel *independent director* yang positif namun tidak signifikan ini berarti jumlah dewan komisaris independen cenderung tidak mempengaruhi *mandatory disclosure*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutedi (2011) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah komisaris independen dan pengungkapan wajib karena ketentuan umum dewan komisaris independen belum cukup besar yaitu sebesar 30% untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris.

2. Hipotesis 1b

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *independent director* dengan *voluntary disclosure*. Nilai variabel *independent director* yang positif namun tidak signifikan ini berarti jumlah dewan komisaris independen cenderung tidak mempengaruhi *voluntary disclosure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2012) yang menyatakan bahwa *independent director* yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini disebabkan karena pemegang saham mayoritas memegang kendali sehingga dewan komisaris independen tidak dapat meningkatkan kinerjanya atau dapat dikatakan bahwa komisaris independen dalam perusahaan hanyalah sebagai formalitas untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2012) yang menyatakan bahwa *independent director* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

3. Hipotesis 2a

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *managerial ownership* dengan *voluntary disclosure*. Nilai variabel *managerial ownership* yang positif namun tidak signifikan ini berarti jumlah dewan komisaris independen cenderung tidak mempengaruhi *mandatory disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *managerial ownership* dengan *disclosure*. Hal ini dikarenakan kepentingan pribadi manajemen belum dapat diselaraskan dengan kepentingan pemilik maupun perusahaan.

#### 4. Hipotesis 2b

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *managerial ownership* dengan *voluntary disclosure*. Nilai variabel *managerial ownership* yang positif namun tidak signifikan ini berarti jumlah dewan komisaris independen cenderung tidak mempengaruhi *voluntary disclosure*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) yang menyatakan bahwa saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan proporsi yang tinggi akan menimbulkan *agency problem*, karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik. Kepentingan pribadi manajemen belum dapat diselaraskan dengan kepentingan pemilik maupun perusahaan, sehingga belum mampu mengurangi perilaku oportunistik secara menyeluruh. Dengan adanya perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen tentu akan menimbulkan *agency cost*.

#### 5. Hipotesis 3a

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *blockholder ownership* dengan *mandatory disclosure*. Nilai variabel *blockholder ownership* yang positif namun tidak signifikan ini berarti *blockholder ownership* cenderung tidak mempengaruhi *mandatory disclosure*. Hal ini mungkin disebabkan karena kepemilikan terkonsentrasi tidak termotivasi untuk melakukan pengungkapan wajib.

6. Hipotesis 3b

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *blockholder ownership* dengan *voluntary disclosure*. Nilai variabel *blockholder ownership* yang positif namun tidak signifikan ini berarti jumlah dewan komisaris independen cenderung tidak mempengaruhi *voluntary disclosure*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chau dan Gray (2012) dalam Oktaviana (2009) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia lebih cenderung terkonsentrasi, sesuai dengan ciri-ciri bentuk kepemilikan perusahaan di Asia, termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, dengan adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi maka perusahaan-perusahaan tersebut tidak termotivasi untuk melakukan pengungkapan selain pengungkapan wajib. Hal ini terjadi karena sedikitnya kepemilikan saham oleh pihak *outsiders* (minoritas) dibandingkan dengan kepemilikan *blockholder* sehingga menyebabkan permintaan akan pengungkapan sukarela perusahaan tidak begitu besar dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar. (kepemilikan *outsider* yang tinggi)

7. *Firms size* terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure*

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan antara *managerial ownership* dengan *mandatory* dan *voluntary disclosure*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan lebih cenderung untuk melaporkan pengungkapan wajib. Hal ini disebabkan karena semakin besar perusahaan lebih cenderung memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan *stakeholder*. Hubungan yang kompleks ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis, dan tuntutan pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kompleksitas tersebut, maka perusahaan akan berusaha untuk menyediakan informasi yang relevan (Zulaikha, 2012). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2005) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar lebih cenderung untuk memberikan pengungkapan

sukarela karena perusahaan memiliki sumber daya yang cukup besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal perusahaan. Informasi itu sekaligus untuk menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan yang lebih lengkap.

8. *Firm Liquidity* terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure*

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan antara *firm liquidity* dengan *mandatory disclosure*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan wajib maupun sukarela. Hal ini dikarenakan perusahaan beranggapan kesehatan kondisi perusahaan sudah merupakan keharusan dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara likuiditas dengan luas pengungkapan informasi.

9. *Auditor Type* terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure*

Dari hasil pengujian *t-test*, membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan antara *auditor type* dengan *mandatory* dan *voluntary disclosure*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tipe auditor tidak mempengaruhi pengungkapan wajib maupun sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian Yunita (2012) yang menyatakan bahwa tipe auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena auditor hanya melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan bukan melakukan audit terhadap laporan tahunan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pamudji dan Trihartati (2010) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS karena kualitas laporan keuangan auditan secara tidak langsung dipengaruhi oleh integritas auditor secara individual. Tingkat pengungkapan wajib yang rendah tidak akan terdeteksi jika auditor secara individual memiliki integritas rendah sekalipun auditor tersebut berasal dari *KAP Big 4*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa variabel *independent director* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Variabel *independent director* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure* karena ketentuan umum dewan komisaris independen belum cukup besar yaitu sebesar 30% untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Sedangkan variabel *independent director* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure* karena pemegang saham mayoritas memegang kendali sehingga dewan komisaris independen tidak dapat meningkatkan kinerjanya atau dapat dikatakan bahwa komisaris independen dalam perusahaan hanyalah sebagai formalitas untuk mengikuti peraturan yang berlaku
2. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa variabel *managerial ownership* dan *blockholder ownership* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Variabel *managerial ownership* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure* karena kepentingan pribadi manajemen belum dapat diselaraskan dengan kepentingan pemilik maupun perusahaan, sehingga belum mampu mengurangi perilaku oportunistik secara menyeluruh. Sedangkan Variabel *blockholder ownership* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure* karena sedikitnya kepemilikan saham oleh pihak *outsiders* (minoritas) dibandingkan dengan kepemilikan *blockholder* sehingga menyebabkan permintaan akan pengungkapan sukarela perusahaan tidak begitu besar dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar. (kepemilikan *outsider* yang tinggi)

3. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa ketika diuji terpisah, variabel *firm liquidity* dan *auditor type* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Hanya variabel *firm size* yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *mandatory* dan *voluntary disclosure* perusahaan. Untuk variabel *firm liquidity*, hal ini dikarenakan perusahaan beranggapan kesehatan kondisi perusahaan sudah merupakan keharusan dalam menjalankan suatu usaha. Untuk variabel *auditor type*, hal ini dikarenakan auditor hanya melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan bukan melakukan audit terhadap laporan tahunan perusahaan. Sedangkan untuk variabel *firm size*, hal ini disebabkan karena semakin besar perusahaan maka semakin kompleks dan item yang akan diungkapkan oleh perusahaan juga semakin banyak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adelopo, I. 2011. Voluntary Disclosure Practices Amongst Listed Companies in Nigeria. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, Vol. 27: 338-345.
- Agustina, L. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan Keuangan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 4 No.1
- Amalia, D. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Surakela pada Laporan Tahunan Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.1 No. 2.
- Arcay, M.R.B., dan Vazquez, M.F.M. 2005. Corporate Characteristics, Governance Rules, and The Extent of Voluntary Disclosure in Spain, *Advances in Accounting*, Vol. 21: 299-331.
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia* (Tinjauan Prespektif Teori Keagenan), Semarang:Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Peraturan No. X.K.6 Keputusan Bapepam dan LK No. Kep. 431/BL/2012*.
- Boesso, Giacomo, dan Kamelesh Kumar. 2006. Drivers of Corporate Voluntary Disclosure. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 20 No. 2: 269-296.

- Beasley, M. 1996. An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, Vol. 71, No. 4: 443-465.
- Chen, C.J.P., dan Jaggi, B. 2000. Association Between Independent non-Executive directors, Family Control, and Financial Disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.19:285-310.
- Effein, S., Darmadji S.H., dan Tan, Y. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu.
- Eng, L.L., dan Mak, Y.T. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 22: 325-345.
- Fama, E.F. 1980. Agency Problem and Theory of the Firm. *Journal of Political Economy*, Vol.88(2): 288-307.
- <http://www.bapepam.go.id/old/old/news/okt2001/kasusbca.pdf>
- Huafang, X., dan Jianguo, Y. 2007. Ownership Structure, Board Composition, and Corporate Voluntary Disclosure. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 22 No. 6.
- Jensen, M.C. 1993. The Modern Industrial Revolution, Exit, and The Failure of Internal Control Systems. *Journal of Finance*, Vol. 48: 831-80.
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, dan Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3: 305-360.
- McKinnon, J.L., dan Dalimunthe, L. 1993. Voluntary Disclosure of Segment Information by Australian Diversified Companies. *Accounting and Finance*, Vol. 33: 33-50
- Merchant, K.A., dan Stede, W.A.V. 2012. *Sistem Pengendalian Manajemen: Pengukuran Kinerja, Evaluasi, dan Insentif*, edisi ketiga, Salemba Empat.
- Mitchell, J.D., Chia, C.W.L., dan Loh, A.S. 1995. Voluntary Disclosure of Segment Information: Further Australian Evidence. *Accounting and Finance*, Vol. 35: 1-16.
- Mokhtar, S.K., dan Mellet, H. 2013. Competition, Corporate Governance, Ownership Structure, and Risk Reporting, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 28 No. 9: 2013.
- Muhamad, R., Suhaily, S., Yazkhiruni, Y., dan Nurmazilah, M. 2009. Disclosure Quality on Governance Issues in Annual Reports of Malaysian PLCs. *Journal International Business Research*, Vol.2:61-72.
- Noe, T. 2002. Institutional Activism and Financial Market Structure. *Review of Financial Studies*, Vol. 15 No.1: 289-319.
- Nuswandari, C. 2009. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, hal 70-84.

- Oktaviana, Ardiasih. 2009. Analisis Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Skripsi Mahasiswa S-1*. Depok:FE UI.
- Pamudji, S. dan Trihartati, A. 2010. *Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*. Artikel Universitas Diponegoro.
- Rosenstein, S. dan Wyatt, J.G. 1990. Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth. *Journal of Financial Economics*, Vol. 26: 175-192.
- Ruland, W., Tung, S., dan George, N.E. 1990. Factors Associated with The Disclosure of Managers Forecast. *The Accounting Review*, Vol.65: 710-21.
- Sutedi, A. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta:Sinar Grafika 2011.
- Schadewitz, H.J., dan Belvins, D.R. 1998. Major Determinants of Interim Disclosures in an Emerging Market. *Business Review*, Vol.16: 41-55.
- Shleifer, A., dan Vishny, R.W. 1986. Large Shareholder and Corporate Control. *Journal of Political Economy*, Vol. 94(3): 461-488.
- Tunggal, A.W. 2014. *Internal Audit, Enterprise Risk Management, dan Corporate Governance*, Harvarindo.
- Walfield, T.D., Wild, J.J., dan Wild, K.L. 1995. Managerial Ownership Accounting Choices and Informativeness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 20 No.1:61-91.
- Yunita, N. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure dan Biaya Hutang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.1 No.1.